

# Menganalisis Program Kinerja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang : Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021 (*Analyzing the Performance Program in Serang Regency and City Government Financial Reports: Serang Regency and City Study 2017-2021*)

Lawe Anasta<sup>1\*</sup>, Vidia Ambarwati<sup>2</sup>

Universitas Mercu Buana, Jakarta<sup>1,2</sup>

[lawe.anasta@mercubuana.ac.id](mailto:lawe.anasta@mercubuana.ac.id)<sup>1\*</sup>, [viividia@gmail.com](mailto:viividia@gmail.com)<sup>2</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 31 Mei 2023

Revisi 1 pada 12 Juni 2023

Revisi 2 pada 17 Mei 2023

Disetujui pada 21 Juni 2023

## Abstract

**Purpose:** Purpose: This study aims to prove, analyze, and determine how to compare the financial performance of the Regional Governments of the Regency and City of Serang for 2017-2021. **Methodology/Approach:** This study used secondary data by taking data from the BPK Central Office. Results of the 2017-2021 Regional Government Financial Reports for Serang Regency and City with a total of 10 Financial Statements for each local government. The sampling in this study used the Financial Statements of the Regional Government of the Regency and City of Serang. Data were analyzed using a Financial Ratio analysis.

**Results/findings:** The results of the study show that the financial ratios used to measure the financial performance of the Regional Government of the Regency and City of Serang, with a comparison to the Regency of Serang and the City of Serang which have differences in terms of Financial Ratios and can be measured by Financial Ratio Analysis so that you can find out the performance of the Regional Government of Serang Regency and Serang City, the results of this study Serang Regency and Serang City have quite good performance in terms of their Financial Statements.

**Keywords:** *Regional Independence, Effectiveness Analysis, Efficiency Analysis, Activity Analysis, Growth Ratio*

**How to Cite:** Anasta, L., Ambarwati, V. (2023). Menganalisis Program Kinerja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang : Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 31-36.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan dampak timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban (Rahmayati, 2016). Perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi telah berdampak pada percepatan perubahan perilaku dan sikap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Seperti yang dikemukakan oleh (Soedarsa, 2017) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga

merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada 28 Maret 2016 silam majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Kepala Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Banten. Keempatnya terbukti menyalahgunakan bantuan untuk korban puting beliung senilai Rp 580 juta pada tahun 2012. Tidak selesai disitu, aksi sadis korupsi juga terjadi dalam proyek tempat penampungan korban (shelter) tsunami di Pandeglang, Banten. Kasus senilai Rp 18 miliar dari anggaran APBN 2017 ini menyeret tiga orang terpidana. Dua tersangka yaitu Direktur PT Tidar Sejahtera Takwin Ali Muchtar dan PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum bernama Ahmad Gunawan. Di 2016, KPK juga pernah menangkap dua anggota DPRD Banten akibat suap pengesahan APBD tentang pembentukan Bank Pembangunan Daerah atau Bank Banten. Melihat fenomena korupsi daerah ini, LSM Banten Bersih pernah membuat penelitian tren pendindakan korupsi di kurun waktu 2017 sampai 2021 semester pertama. Hasilnya, ada 51 kasus korupsi terjadi di Banten dengan jumlah tersangka sampai 112 orang. Penelitian ini juga menemukan angka kerugian negara sampai Rp 241 miliar dengan nilai suap Rp 4,2 miliar. Koordinator Banten Bersih, Gufroni mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan faska ditangkanya gubernur Banten oleh KPK. Tapi ternyata, tren korupsi di Banten menurutnya malah terjadi di semua sektor bahkan masuk ke desa-desa. Ia memerinci, di wilayah provinsi sejak 2017 muncul 6 kasus, Kota Serang 5 kasus, Kabupaten Serang 10 kasus, Kota Tangerang 5 kasus, Tangerang 4 kasus, Cilegon 4 kasus, Pandeglang dan Lebak 7 kasus. "Kalau kita lihat data, setelah Gubernur Atut korupsi masih menjadi tren," kata Gufroni saat berbincang dengan detikcom, Serang, Banten. Sehingga menimbulkan Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan selama periode 2017-2021 mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi, karena belum sepenuhnya percaya terhadap kinerja pemerintah dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil. Dengan adanya Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, karena masyarakat belum menerima dampak pembangunan fasilitas di Kabupaten dan Kota Serang dan masyarakat jadi tidak mau membayar retribusi kepada pemerintah Sehingga Penelitian ini ditunjukkan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Serang. Saya mengambil Penelitian ini karena saya ingin mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Daerah di Kabupaten dan Kota Serang, dengan pengukuran menggunakan Analisis Rasio Keuangan.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Teori Tata Laksana (*Stewardship Theory*)**

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*.

### **2.2 Teori Pertanggungjawaban (*Accountability Theory*)**

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

### **2.3 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### **2.4 Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Oktavia, 2016)

#### **2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **2.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Andre, 2016).

#### **2.7 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 3 Dana Bagi Hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Saragih dalam Swandewi 2017), DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). Wulandarai (2023) DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat dan mendesak. Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

#### **2.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

karakteristik kualitatif laporan keuangan. yaitu relevan, handal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam kalimat (Sugiyono, 2010). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang tahun 2017-2021 dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Saya menggunakan jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif karena membandingkan dan menjelaskan indikator kinerja keuangan dengan menggunakan rasio perhitungan, serta menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten dan Kota Serang secara terperinci.

#### **3.1 Definisi dan Operasional Analisis**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu:

##### **a. Analisis Kemandirian Daerah**

Analisis kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak

- dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b. Analisis Efektivitas  
Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.
  - c. Analisis Efisiensi  
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.
  - d. Analisis Aktivitas  
Aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.
    - a) Rasio Keserasian  
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :
      - Rasio Belanja Rutin terhadap APBD
      - Rasio Belanja Modal terhadap APBD
  - e. Analisis Pertumbuhan  
Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

### 3.2 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas waktu (time series) pada Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan Pendapatan. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas seksi/Industri (cross section) adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

## 4. Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 4.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota atau Kabupaten pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Yaitu dengan menggunakan beberapa rasio, yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Selanjutnya rasio aktivitas dilihat dari rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, sedangkan pada rasio pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan belanja pembangunannya. Pada penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hasil Laporan Keuangan.

- a) Hasil Analisis Rasio Kemandirian Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang menunjukkan kriteria yang berbeda – beda. Pada Kabupaten Serang memiliki rata-rata presentase 36.61% yang memiliki Kriteria Rendah dan Kota Serang memiliki rata-rata presentase 17.2% yang memiliki Kriteria Rendah Sekali.
- b) Hasil Analisis Rasio Efektivitas Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021 pada Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang menunjukkan kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah dari anggaran yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Kabupaten dan Kota Serang memiliki Tingkat efektifitas dengan kriteria sangat efektif karena >100%. Fluktuatif dari tahun 2017 – 2021, Kabupaten Serang memiliki rata-rata persentase sebesar 105.62% dan Kota Serang memiliki rata-rata persentase sebesar 113.21%.

- c) Hasil Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang menunjukkan beragam kriteria yaitu Sangat Efisiensi dan Cukup Efisiensi dalam mengelola keuangan daerahnya karena biaya yang dikeluarkan pemerintah.
- d) Hasil Analisis Rasio Belanja Rutin APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Belanja Rutin APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang memiliki rata-rata 35.27% dan Pada Pemerintah Daerah Kota Serang tahun 2017-2021 memiliki persentase rata-rata 47.54%.
- e) Hasil Analisis Rasio Belanja Modal APBD Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Belanja Modal APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota Serang memiliki rata-rata presentase 8.74% dan Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki presentase 10.33% yang berarti bahwa pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kota serang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten serang.
- f) Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang ialah Nilai rata-rata rasio pertumbuhan pada pemerintah daerah kabupaten serang pada Tahun 2017 - 2021 sebesar 18.09%. dan rata-rata rasio pertumbuhan pada pemerintah daerah kota serang pada tahun 2017 - 2021 sebesar 37.96%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota serang mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 5. Kesimpulan dan saran

Penelitian ini meneliti tentang perbandingan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang tahun 2017-2021.

1. Dalam Rasio Kemandirian untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang memiliki Kriteria Rendah dan Rendah Sekali, Dengan memiliki Pola Hubungan Delegatif yang rendah berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Dalam Rasio Efektivitas untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang memiliki Kriteria Sangat Efektif. Dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang memiliki Pola Hubungan Konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Dalam Rasio Efisiensi untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang memiliki kriteria Sangat Efisien dan Cukup Efisien.
4. Dalam Rasio Belanja Rutin APBD untuk tingkat Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kabupaten dan Kota Serang memiliki Rata-rata di atas 25% yang berarti pemerintah daerah hampir seimbang mengalokasikan dana pelayanan publik dengan belanja aparatur daerahnya, tetapi masih tetap lebih dominan mengalokasikan dana pelayanan publik dibandingkan dengan belanja aparatur daerahnya.
5. Dalam Rasio Belanja Modal APBD untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang, Dari Keseluruhan Kabupaten dan Kota Serang memiliki Rata-rata kurang dari 20% yang berarti bahwa alokasi untuk infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Kabupaten dan Kota Serang cenderung lebih kecil jika di bandingkan dengan belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Dalam Rasio Pertumbuhan untuk tingkat Kabupaten Serang dan Kota Serang, Semua Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Serang rata-rata telah menunjukkan Pertumbuhan dari tahun ke tahun.

## Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan terhadap rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang serta kesimpulan yang telah dibuat, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Serang antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Banten
  - a. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur akan menjadi pendorong aktivitas ekonomi Kabupaten dan Kota Serang dan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Serang.

- b. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota Serang diharapkan Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan membuat kebijakan yang merata dan lebih mendukung pada sektor-sektor unggulan terutama sektor industri yang merupakan penyumbang pendapatan pemerintah daerah untuk Kabupaten dan Kota Serang.
2. Setelah penelitian di Pemerintah Di Kabupaten dan Kota Serang, berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
    - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian.
    - b. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktu penelitian.
    - c. Data yang di gunakan agar tidak hanya sebatas data sekunder, tapi juga dapat menggunakan data primer.
    - d. Peneliti selanjutnya dapat melengkapi rasio keuangan yang digunakan untuk penelitian.

### Daftar Pustaka

- Al, F. etal. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Andre. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3). 4(3), 564–571.
- Asri, H. dalam. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021–1034. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4037>
- Denhardt. (1998). *Model Akuntabilitas*. 2(4), 18.
- Halim dalam Dewi, P. K., & Hafni, N. (2017). (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Teknologi*, 1(1), 69–73. <https://doi.org/10.11113/jt.v56.60>
- Halim dan Kusufi. (2017). *No Title*. 10–40.
- Istiningtias. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2017 (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta). *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Oktavia, R. dalam. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 738–747. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13153>
- Putro. (2013). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Starling. (1998). *Digital Repository Universitas Jember*. 164.
- Syamsi. (2010). *Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah*.
- Widodo, H. dalam. (2012). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).(Joko Pramono). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. Retrieved from <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97/80%0A%0A%0A>
- Wulandari, D. A. (2023). Pengaruh Kebijakan Hutang, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen: Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 109–122. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i2.1224>
- Wulaningrum. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- [www.bantenprov.go.id](http://www.bantenprov.go.id)